

### **BAB III**

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( SOP AK )**

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
SEKRETARIAT**

**01/SOP-Disdukcapil/2021  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati**

**Cimahi Utara Kota Cimahi**

## 1. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA CIMABI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	<b>01/SOP-Disdukcapil/2021</b>
	<b>TGL PEMBUATAN</b>	<b>02 Juni 2021</b>
	<b>TGL REVISI</b>	<b>01 Juli 2021</b>
	<b>TGL EVEKTIF</b>	<b>02 Agustus 2021</b>
	<b>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	 <b>Dra. IPAH LATIPAH, M.Si</b> Pembina TK.I NIP. 196502271991022001
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	
	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI (LKIP)</b>
	<b>DASAR HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian da Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;</li> <li>9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Kertas</li> <li>4. Lembar kerja/rencana kerja dan anggaran</li> <li>5. <i>Term of reference</i></li> </ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan tidak tertib administrasi dan akan menghambat proses berikutnya.	Agenda kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

**Flowchart SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	SEKRETARI SDINAS	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	STAF/JAB FUNGSIONAL UMUM	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Surat masuk	1 Jam	SK LKIP	Dirapatkan
2.	Membuat format pengumpulan data laporan capaian kinerja masing-masing bidang dan sekretariat					Formulir Penyusunan LKIP SKPD	2 Jam	Formulir Penyusunan LKIP SKPD	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data laporan capaian kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Formulir Penyusunan LKIP SKPD	2 Jam	Formulir Penyusunan LKIP SKPD	-
4.	Pengumpulan format data dan informasi laporan capaian kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Formulir Penyusunan LKIP SKPD	3 Jam	Data per bidang	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi laporan capaian kinerja yang telah terkumpul					Data dan informasi per bidang	7 Hari	Draft LKIP	-
6.	Menyusun <i>draft</i> LKIP SKPD					<i>Draft</i> LKIP	2 Bulan	<i>Draft</i> LKIP	Koordinasi dengan Bagian Organisasi
7.	Mengoreksi <i>draft</i> LKIP SKPD melalui rapat internal SKPD					<i>Draft</i> LKIP	1 Hari	<i>Draft</i> LKIP	-
8.	Persetujuan <i>draft</i> LKIP dan penandatanganan dokumen LKIP oleh Kepala Dinas					<i>Draft</i> LKIP	15 Menit	Dokumen LKIP	-

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
SEKRETARIAT**

**02/SOP-Disdukcapil/2021  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA**

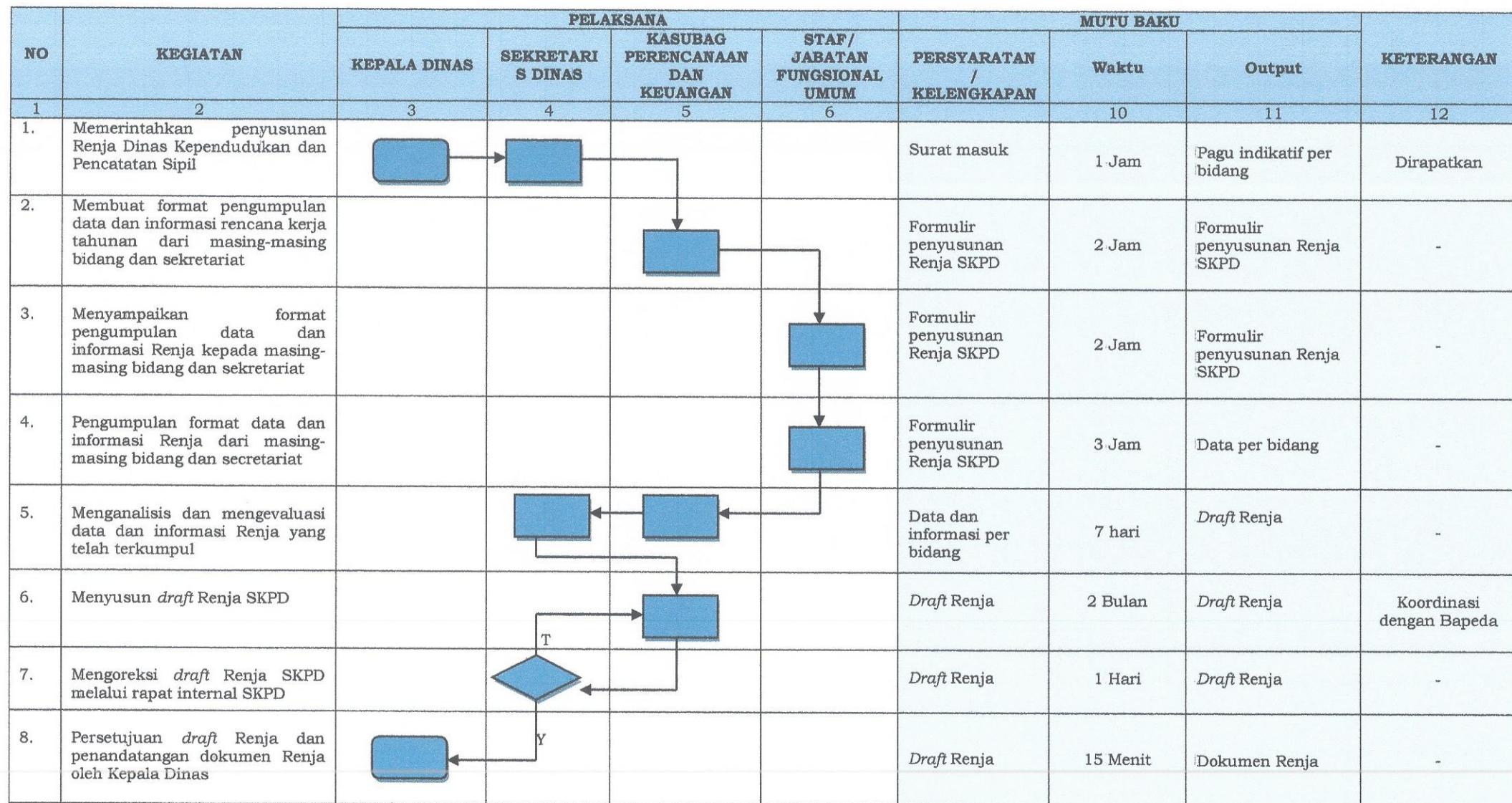
**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati  
Cimahi Utara Kota Cimahi**

## 2. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

 <p><b>PEMERINTAH KOTA CIMAHİ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p>	NOMOR SOP	<b>02/SOP-Disdukcapil/2021</b>
	TGL PEMBUATAN	<b>02 Juni 2021</b>
	TGL REVISI	<b>01 Juli 2021</b>
	TGL EVEKTIF	<b>02 Agustus 2021</b>
	DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  <b>Dra. IPAH LATIPAH, M.Si</b> Pembina TK.I NIP. 196502271991022001
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN RENCANA KERJA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian da Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);</li> </ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembuatan Rencana Kinerja;</li> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;</li> <li>Memiliki gagasan dan kreativitas</li> <li>Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>Disiplin</li> </ol>	

<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
-	1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Lembar kerja/rencana kerja dan anggaran 5. <i>Term of reference</i>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak tertib administrasi dan akan menghambat proses selanjutnya.	Agenda kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

## FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

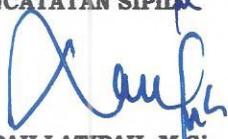


**PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
SEKRETARIAT**

**03/SOP-Disdukcapil/2021  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati  
Cimahi Utara Kota Cimahi**

### 3. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

 <p><b>PEMERINTAH KOTA CIMABI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	<b>03/SOP-Disdukcapil 2021</b>
	<b>TGL PEMBUATAN</b>	<b>02 Juni 2021</b>
	<b>TGL REVISI</b>	<b>01 Juli 2021</b>
	<b>TGL EVEKTIF</b>	<b>02 Agustus 2021</b>
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p><b>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p>  <p>Dra. IPAH LATIPAH, M.Si Pembina TK.I NIP. 196502271991022001</p>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);</li> </ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembuatan Rencana Kinerja;</li> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;</li> <li>Memiliki gagasan dan kreativitas</li> <li>Mampu berkomunikasi dengan baik Disiplin</li> </ol>	

<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
-	1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Lembar kerja/rencana kerja dan anggaran 5. <i>Term of reference</i>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak tertib administrasi dan akan menghambat proses selanjutnya.	Agenda kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

## FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI

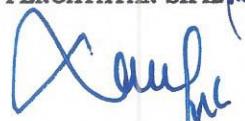
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	SEKRETARI S DINAS	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	STAF/JABATAN FUNGSIONAL UMUM	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	
1.	Memerintahkan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Surat masuk	1 Jam	Pagu indikatif per bidang	Dirapatkan
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana strategi lima tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat					Formulir penyusunan Renstra SKPD	2 Jam	Formulir penyusunan Renstra SKPD	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi renstra lima tahunan kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Formulir penyusunan Renstra SKPD	2 Jam	Formulir penyusunan Renstra SKPD	-
4.	Pengumpulan format data dan informasi rencana strategi dari masing-masing bidang dan secretariat					Formulir penyusunan Renstra SKPD	3 Jam	Data per bidang	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi rencana strategi yang telah terkumpul					Data dan informasi per bidang	7 hari	Draft Renstra	-
6.	Menyusun draft Renstra SKPD						-	-	-
7.	Mengoreksi draft Renstra SKPD melalui rapat internal SKPD						-	-	-
8.	Persetujuan draft Renstra dan penandatangan dokumen Renstra oleh Kepala Dinas					Dokumen Renstra	-	-	-

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
SEKRETARIAT**

**04/SOP-Disdukcapil/2021  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN  
ANGGARAN (RKA/DPA)**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati  
Cimahi Utara Kota Cimahi**

**4. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (RKA/DPA)**

 <p><b>PEMERINTAH KOTA CIMABI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	<b>04/SOP-Disdukcapil/2021</b>
	<b>TGL PEMBUATAN</b>	<b>02 Juni 2021</b>
	<b>TGL REVISI</b>	<b>01 Juli 2021</b>
	<b>TGL EVEKTIF</b>	<b>02 Agustus 2021</b>
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  <b>Dra. IPAH LATIPAH, M.Si</b> Pembina TK.I NIP. 196502271991022001
	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/ DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian da Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;</li> <li>9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 058 seri D);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembuatan Rencana Kinerja;</li> <li>2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;</li> <li>3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;</li> <li>4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;</li> <li>5. Memiliki gagasan dan kreativitas</li> <li>6. Mampu berkomunikasi dengan baik Disiplin</li> </ol>	

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
-	1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Lembar kerja/rencana kerja dan anggaran 5. <i>Term of reference</i>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak tertib administrasi dan akan menghambat proses selanjutnya.	Agenda kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

### FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RKA/DPA

